

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT PENGADUAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

PENGADUAN
NOMOR :

TENTANG

SENGKETA/KONFLIK *) TANAH SELUAS ...M²,
TERLETAK DI ..., (*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...

I. Identitas Pengadu

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. Umur :

II. Uraian singkat kasus:

.....
.....
(*Disi dengan keterangan siapa, dimana, mengapa, dengan apa, kapan*)

III. Data Yang Dilampirkan :

- a.
- b.
- c.

Dengan ini pengadu membenarkan dan bertanggungjawab atas keterangan yang diberikan.

Penerima Pengaduan

.....(*tempat*),.....(*tanggal, bulan dan tahun*)
Pengadu

NIP.

(nama pengadu)

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN PENGADUAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGADUAN
NOMOR :

TENTANG

SENGKETA/KONFLIK *) TANAH SELUAS ...M²,
TERLETAK DI ..., (*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...

Pada hari ini, tanggal,, telah menerima pengaduan
Nomor..... dari:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Peristiwa yang dilaporkan:
Pengaduan tentang Sengketa/konflik dengan obyek tanah yang
terletak di dst

Tujuan pengaduan:

.....
.....
.....

Penerima(*tempat*),.....(*tanggal, bulan dan tahun*)
Pengadu

NIP.

(nama pengadu)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT REGISTER PENERIMAAN PENGADUAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

REGISTER PENERIMAAN PENGADUAN SENGKETA/KONFLIK *)
BULAN/TAHUN.....

No	Waktu (hari, tanggal)	Para Pihak (pelapor dan terlapor)	Obyek (Lokasi, luas dan status)	Pokok Pengaduan	Penerimaan Pengaduan	Bentuk Pelayanan	Ket

Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah
BPN/Dirjen *)

.....
Nip.

Catatan:

1. Register ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah BPN/Dirjen;
2. Dilakukan rekapitulasi data setiap bulan;
3. Dilakukan evaluasi setiap 4 (empat) bulan.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

A. FORMAT SURAT PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Informasi perkembangan penyelesaian
Sengketa/konflik/perkara

Kepada:

.....

1. Rujukan :
 - a. Surat Pengaduan saudara
 - b. Surat....
2. Bersama ini diinformasikan perkembangan penyelesaian kasus pertanahan sebagai berikut:
 - a. Obyek yang disengketakan:
Tanah seluas ... M²/Ha, terletak di ..., (desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), antara ... dengan ... No.Reg.Kasus: ...
 - b. Para Pihak.
 - 1) Pihak pengadu: nama, alamat sebagai pemilik SHM
 - 2) Pihak termohon:
3. Tindakan yang telah dilakukan:
4. Dst:... (Bila ada kendala atau masalah lain yang perlu dapat ditambahkan)

Demikian untuk menjadi maklum.

Kota, tgl/ bln/ tahun

Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor
Wilayah BPN /Direktur

(.....)
NIP.

*)Pilih salah satu

B. FORMAT REGISTER PENYELESAIAN SENKETA, KONFLIK DAN PERKARA

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

REGISTER PENYELESAIAN SENKETA, KONFLIK DAN PERKARA
BULAN/TAHUN.....

No. Reg	Pengaduan	Para Pihak	Obyek Sengketa dan Konflik	Pokok Masalah	Kronologi	Proses Peradilan	Dokumen/Alas Bukti	Posisi Berkas/ Penanganan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A00 10	2-6-10 No. 2/2010 PT.DNA	Pelapor PT.DNA Jl.Senopati 2 Jaksel Terlapor: PT.MBX Jl. Sambas 3 Pihak terkait: BPN Jakpus	Kavling Sudirman 65 Luas 8 Ha Ex HGB Dikuasai PT. MBX	Masalah Inti sengketa PT. DNA memohon pembatalan SHGB PT. MBX	Tanah semula Girik C123 Dibeli milik PT.DNA Terbit SHGB 23/1978 1971 diserobot PT. MBX 1977 PT.DNA menang PTUN dg.Pembatalan SHGB PT. MBX	1971 PT.DNA menggugat PT. MBX 1974 menang di PN Jakpus 1975 menang Kasasi Usulan Kantah Jakpus Proses penanganan di BPN 1978 Mediasi gagal Dst	Pelapor: SK KaBPN No SHGB no.1 Putusan inkrah No..... Terlapor: Putusan PTUN No.. Dst	4 / 6/11: agenda 6/ 6/11: KaKantah 10/ 6/11: Pengolah 20/6/11: Teliti Lap	- Atensi DPR RI surat tgl...No... - Teguran PTUN No. .. tgl

Mengetahui,
Kepala Kantor Pertanahan/ Kepala Kantor Wilayah BPN *)
.....
Nip.

Catatan:

1. Register ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor Wilayah BPN;
2. Dilakukan rekapitulasi data setiap bulan;
3. Dilakukan Anev setiap semester.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT ANALISIS

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN

ANALISIS SENGKETA/KONFLIK/PERKARA *)

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR:
 - a. Surat Pengaduan dari para pihak/inisiatif Kementerian; atau
 - b. Gugatan Perkara No...
- II. PARA PIHAK.
 - a. Pihak pengadu/penggugat/pemohon:
nama, alamat
 - b. Pihak lawan/tergugat/termohon terkait:
nama, alamat
- III. DOKUMEN YANG DIPERIKSA
 - a. Data fisik;
 - b. Data yuridis; dan/atau
 - c. Putusan pengadilan
- IV. POKOK PERMASALAHAN
- V. URAIAN
- VI. ANALISIS
- VII. KESIMPULAN **)
 - a. Sengketa dan Konflik merupakan kewenangan kementerian sesuai Pasal 11 ayat (3);
 - b. Sengketa dan Konflik bukan merupakan kewenangan Kementerian; atau
 - c. Analisa dari putusan pengadilan.

Kota, tgl/ bln/ tahun

Pejabat

1. ()
2. ()
3. ()

Mengetahui:
Kepala Kantor Pertanahan

(.....)

*) Pilih salah satu

**) Hasil kesimpulan disesuaikan dengan analisis penanganan sengketa dan konflik/perkara dalam melaksanakan putusan pengadilan

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT PENJELASAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV... *)

NOMOR :.....

TENTANG

PENJELASAN SENGKETA ATAU KONFLIK BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DALAM SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. KEPADA YTH. :
Pihak Pengadu.
- II. DASAR
 - a. Surat permohonan
 - b. Hasil pengumpulan data
 - c. Hasil analisis
- III. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil analisis oleh Kantor Pertanahan ..., bersama ini disampaikan bahwa pengaduan/permohonan Saudara terkait sengketa/konflik/perkara yang disampaikan kepada kami sesuai surat nomor ..., tanggal ..., tidak dapat kami laksanakan karena:

- a. Tidak termasuk cacat administrasi/bukan merupakan kewenangan kementerian sesuai Pasal ... Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- b. dst

..... ,

Kepala Kantor Pertanahan,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....;
3. Kepala Ditjen..... (Pengolah Data);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota.....
5. Arsip.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
NOMOR:.../...../..../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- Menimbang : Dalam rangka penyelesaian sengketa/konflik/perkara tersebut di atas, yang diajukan oleh pemohon ... dengan Surat tanggal, perlu dikeluarkan surat perintah ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Kepada : **MEMBERI PERINTAH**
Tim Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara Register No....., dengan susunan Tim sebagai berikut:
1. Nama : NIP:
Jabatan : sebagai Ketua Tim
2. Nama : NIP:
Jabatan : sebagai Sekretaris
- Untuk : 1. melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan;
2. melakukan paparan; dan
3. menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian sengketa/konflik/perkara.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran ...

Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesainya Penyelesaian sengketa/konflik/perkara.^{*)}

Dikeluarkan di
pada tanggal
Kakanwil/Dirjen/Menteri *)
.....
NIP.

Tembusan:
Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Kantor ...
2. Yang bersangkutan.
*) Pilih salah satu

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT HASIL PENGKAJIAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

HASIL PENGKAJIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA^{*)}

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR:
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No. ...
- II. PARA PIHAK
 - a. Pihak pengadu/penggugat/pemohon:
nama, alamat
 - b. Pihak lawan/tergugat/termohon terkait:
nama, alamat
- III. OBYEK YANG DIPERMASALAHKAN
 - a. Tanah obyek sengketa: lokasi di (alamat, Jln., desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), status tanah....., seluas; dan/atau
 - b. Data Sertipikat Hak Atas Tanah....
- IV. POKOK PERMASALAHAN
 - a. Pasal 11 ayat (3); atau
 - b. Gugatan Perkara No. ...
- V. DOKUMEN YANG DIPERIKSA
- VI. URAIAN KASUS
 - a. Akar Masalah
 - b. Analisa Yuridis
 - c. Analisa sosiologis, fisik, politis, kemanfaatan, dsb.
- VII. HASIL KAJIAN
 - a. Pendapat/*legal opinion*; dan
 - b. Rekomendasi.

Kota, tgl/ bln/ tahun
Pejabat/Tim Pengolah
1. ()
2. ()
3. ()

Mengetahui:
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian^{*)}

(.....)

^{*)} Pilih salah satu

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT TUGAS TIM PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN *)

SURAT TUGAS
PEMERIKSAAN LAPANGAN SENGGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
NOMOR:.../...../..../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- Menimbang : Dalam rangka penyelesaian sengketa/konflik/perkara pertanahan tersebut di atas, yang diajukan oleh pemohon ... dengan Surat tanggal, perlu dikeluarkan surat perintah ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

MEMBERI PERINTAH

- Kepada : Pejabat/Tim Penyelesaian sengketa dan konflik/perkara No....., dengan susunan Tim sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Nama:..... | NIP: |
| Jabatan : | sebagai Ketua Tim |
| 2. Nama:..... | NIP: |
| Jabatan : | sebagai Sekretaris |
| 3. Nama:..... | NIP: |
| Jabatan : | sebagai Anggota |

- Untuk : melakukan pemeriksaan lapangan terhadap obyek sengketa dan konflik/perkara tanah seluas ... M²/ha, terletak di ..., (desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi), antara ... dengan ...

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran ...

Surat Tugas ini berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan selesainya Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dikeluarkan di
pada tanggal
Kepala Kantor/Kakanwil/Dirjen/Menteri*)
.....
NIP.

- Tembusan:
Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala ...
2. Yang bersangkutan.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN SENKETA/KONFLIK/PERKARA^{*)}
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

Pada hari ini ... tanggal: ... bulan ... tahun ... di ..., telah dilaksanakan Pemeriksaan Lapangan dengan hasil sebagai berikut :

- I. DASAR
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No. ...
- II. POKOK PEMERIKSAAN LAPANGAN
 - a. Obyek atau tempat pemeriksaa lapangan;
 - b. Pelaksana Pemeriksaan Lapangan;
 - 1) Peserta:
 - a) ...
 - b) ... dst
 - 2) Data fisik dan yuridis yang didapat:
 - a) ...
 - b) ... dst
 - 3) Pokok-pokok diskusi, tanggapan dan masukan peserta.
- III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
 - a. Kesimpulan; dan
 - b. Saran dari peserta

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat jabatan yang melekat, kecakapan, dan dengan kesanggupan untuk dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku, ditutup dan ditandatangani di:

Kota, tgl/ bln/ tahun
Peserta Pemeriksaan Lapangan
Berisi Nama/instansi/jabatan
1. ... /... /... ()
2. ... /... /... ()
3. ... /... /... ()
Dst

Mengetahui:
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian *)
(.....)

Saksi-saksi:
1. (.....)
2. (.....)

^{*)} Pilih salah satu

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT UNDANGAN PAPARAN/MEDIASI^{*)}

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

FORMAT UNDANGAN PAPARAN/MEDIASI^{*)}
SENKGETA/KONFLIK/PERKARA^{*)}

UNDANGAN PAPARAN/MEDIASI

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran : ... Lembar
Hal : Undangan Paparan/Mediasi

Yth.
Sdr. (Daftar Terlampir)
di -

Tempat

1. Dasar :
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No.
2. Dalam rangka penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara yang ditangani oleh Kantor Pertanahan bersama ini dengan hormat diharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada :
 - Hari/tanggal :
 - Waktu :
 - Tempat :
 - Acara : Pembahasan masalah ...
 - Pimpinan Paparan/Mediasi :
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kehadiran yang tepat waktu diucapkan terima kasih.

Kota, tgl/ bln/ tahun
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian *)

.....
NIP.

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala
2. Kepala
3. Arsip.

Catatan: dimohon membawa data yang perlu dibahas dalam Paparan/Mediasi

^{*)} Pilih salah satu

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR YANG DIUNDANG

- 1.
- 2.dst

Kota, tgl/ bln/ tahun
Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian
.....
NIP.

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT NOTULEN PAPARAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN¹⁾

NOTULEN PAPARAN
PELAKSANAAN PAPARAN
SENGKETA/KONFLIK/PERKARA²⁾
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR
- Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara;
 - Berita Acara Pelaksanaan Paparan
- II. POKOK PAPARAN
- Obyek sengketa/konflik/perkara:
Tanah terletak di....., seluas, dengan Sertipikat No...atas nama Permohonan Pembatalan SK/SHM/SHGB No....
 - Para Pihak :
 - Pemohon : nama, alamat, sebagai pemegang SHM
 - Termohon : nama,status dalam perkara
 - Tempat dan Waktu Paparan
 - Tempat :
 - Hari/tanggal/jam :
 - Pelaksana Paparan
 - Pimpinan : Nama, jabatan, instansi
 - Pemapar : Nama, jabatan, instansi
 - Peserta: (Daftar Peserta Terlampir)
- III. PELAKSANAAN PAPARAN
- Pembukaan paparan oleh: ...
 - Pokok masalah ...
 - Tujuan paparan ...
 - Dst
 - Paparan oleh: ...
 - Kronologi masalah ...
 - Kronologi Perkara di Pengadilan (apabila perkara)...
 - Permasalahan
 - Diskusi/Tanggapan:
- IV. HASIL PAPARAN
- Resume Kronologi Kasus dan Penyelesaian
 - Kesimpulan Paparan:
 - Aspek hukum Perdata.
 - Aspek Tata Usaha Negara.
 - Aspek Pidana.
 - Rekomendasi.
 - Saran kepada instansi dan kepada para pihak.

Kota, tanggal/bulan/tahun

Notulis Paparan (Nama/Instansi/Jabatan)
... /.../ ... ()

Mengetahui:
Pimpinan Paparan

(.....)

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA PAPARAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN^{*)}

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PAPARAN
SENGKETA/KONFLIK/PERKARA^{*)}
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

Pada hari ini ... tanggal: ... bulan ... tahun ... di ..., telah dilaksanakan paparan sengketa/
konflik/perkara dengan resume dan hasil sebagai berikut :

- I. DASAR
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian atau Gugatan Perkara No.
 - c. Surat Undangan Paparan tanggal No.....
 - d. Surat lain yang perlu
 - e. Disposisi Pimpinan
- II. POKOK PAPARAN
 - a. Obyek Masalah Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan Paparan;
 - 1) Pimpinan Paparan dan Pemapar, (nama, jabatan, instansi)
 - 2) Peserta (nama, jabatan, instansi), (daftar hadir peserta terlampir)
 - 3) Pokok permasalahan
 - a) Kronologi sengketa dan konflik;
 - b) Perkembangan penyelesaian sengketa dan konflik;
 - c) Pokok-pokok Diskusi/tanggapan.
- III. HASIL PAPARAN
 - a. Resume Kronologi Kasus dan Penanganan
 - b. Kesimpulan Paparan:
 - 1) Aspek hukum Perdata.
 - 2) Aspek Tata Usaha Negara.
 - 3) Aspek Pidana.
 - c. Rekomendasi.
 - d. Saran kepada instansi dan kepada para pihak.

Demikian Berita Acara Paparan dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan dengan kesanggupan untuk dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku, ditutup dan ditandatangani di :

Kota, tgl/ bln/ tahun

Mengetahui:
Pimpinan Paparan

(.....)

Perwakilan Peserta Paparan (*berisi Nama/instansi/jabatan*)

1. ... /... /... ()
2. ... /... /... () dst

^{*)} Pilih salah satu

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

LAPORAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN¹⁾

LAPORAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK/PERKARA²⁾

No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...

No.Reg.Kasus: ...

I. LANDASAN:

a. Legitimasi:

Laporan Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara ini merupakan telaah akhir yang disajikan oleh jajaran Kementerian (Staf Pengolah Data, Kepala Seksi, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, Direktur dan Direktur Jenderal, yang bertanggungjawab atas penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, yang menjadi dasar bagi Kementerian dalam menetapkan penyelesaian yang memenuhi syarat dan aturan hukum disertai dokumen resmi yang menyertai dokumen resmi pertanahan lainnya, dan yang disimpan bersama dokumen pertanahan lainnya, serta dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seluruh jajaran staf Kementerian baik secara hukum, administrasi, maupun secara fisik. Disamping itu, seluruh jajaran staf telah pula mempertimbangkan segala aspek pertanahan lainnya yang diperlukan dalam penetapan penyelesaian masalah dimaksud sehingga keputusan yang ditetapkan oleh Menteri terhindar dari kasus pertanahan di kemudian hari.

b. Dasar Pengolahan Data: *(diisi surat yang sangat perlu saja)*

- 1) Surat Pengaduan dari para pihak.
- 2) SK Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- 3) Gugatan Perkara No. ...
- 4) Surat lainnya, dst.

II. POKOK KASUS PERTANAHAN

a. Masalah Pertanahan:

- 1) Sengketa hak atas tanah, batas tanah, penyerobotan tanah, ganti rugi
- 2) Pembatalan hak atas tanah karena putusan atau cacat administrasi

b. Obyek yang disengketakan:

- 1) Tanah obyek sengketa terletak di dengan surat hak no....., gambar ukur .
- 2) Surat yang dimohonkan batal: SK/SHM/Notanggal.....

- c. Para Pihak:
 - 1) Pengadu/Pemohon:
nama, alamat sebagai pemilik SHM
 - 2) Termohon
nama, alamat sebagai pemilik SHGB dan menguasai fisik
nama, alamat sebagai pembeli ketiga
- d. Tujuan Pengaduan:
 - 1) Pembatalan SK, Sertipikat hak atas tanah No..... dan/atau
 - 2) Penerbitan Sertipikat hak atas tanah, dsb
- e. Posisi kasus
 - 1) Kasus ini berawal dari pengaduan/permohonan
 - 2) Telah ditangani oleh Kantah dengan kesimpulan.....
 - 3) Telah diproses di Kanwil dengan kesimpulan
 - 4) Terakhir diproses di Dirjen Kementerian dengan Paparan/Mediasi tanggal

III. DATA PENDUKUNG:

- a. Data pihak pengadu:

Surat Keputusan, surat hak atas tanah, putusan pengadilan, BA penelitian, dan surat pendukung lainnya. Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua s/d termuda.
- b. Data pihak Termohon/ Terkait lainnya:

Surat Keputusan, surat hak atas tanah, putusan pengadilan, BA penelitian, dan surat pendukung lainnya. Daftar dokumen diurutkan mulai dari tanggal tertua s/d termuda.
- c. Data pendukung lainnya:

Data yang diperoleh Pengolah misalnya berupa:

 - 1) surat keterangan, surat edaran, surat keputusan, dsb
 - 2) hasil tinjauan di lapangan, keterangan penguasaan fisik tanah
 - 3) notulen dan atau Berita Acara hasil paparan/mediasi sengketa/konflik/perkara
 - 4) dokumen pendukung lainnya

Catatan:

(Untuk memudahkan pembahasan, agar daftar dokumen diurutkan mulai dari dokumen tanggalnya terdahulu sampai ke dokumen yang terkini)

IV. URAIAN MASALAH

- a. Kronologi kejadian:
 - 1) Status tanah yang disengketakan berasal dari
 - 2) Tahundijual kepada dengan bukti ...
 - 3) Tahun .. disertipikatkan
 - 4) Kronologi perkara
 - 5) Sampai posisi obyek terakhir
- b. Proses Penyelesaian:
 - 1) Penyelesaian di Kantah: data sengketa/konflik/perkara dan usulan
 - 2) Penyelesaian di Kanwil/BPN: data sengketa/konflik/perkara dan usulan
 - 3) Penyelesaian terakhir di BPN RI/instansi lainnya

V. ANALISIS MASALAH

- a. Acuan hukum: (diisi pasal-pasal yg akan digunakan dalam analisis)
 - 1) Undang-undang: No.... Tahun tentang, terutama pasal-pasal:
Pasal ...: intinya
Pasal ... : intinya
 - 2) Peraturan Pemerintah: No....Tahun....tentang..., terutama pasal-pasal:
Pasal ...: intinya
Pasal ... : intinya
 - 3) Peraturan Kepala BPN: No.... Tahun tentang , terutama pasal-pasal:
Pasal ...: intinya
Dst

- b. Analisis yuridis
 - 1) Aspek Perdata (analisis alas hak)
 - Pihak pengadu:
 - Alas haknya berawal dari dst
 - Pihak termohon/lawan:
 - Alas haknya berawal dari dst

Dengan demikian alas hak yang lebih kuat adalah pada pihak yaitu berupa
 - 2) Aspek Tata Usaha Negara (analisis keabsahan administrasi)
 - Surat hak pihak pengadu:
 - Surat Hak atas tanah dst
 - Surat Hak pihak termohon/lawan:
 - Surat Hak atas tanah dst

Dengan demikian dokumen hak yang lebih sah adalah pihak, didukung dengan putusan
 - 3) Aspek Pidana (Bila ada tindakan pidana yg terkait keabsahan hak).
 - Dalam sengketa ini terdapat tindak pidana yaitu berupa
 - Pengaruh terhadap keabsahan hak
- c. Analisis Fisik/Sosial/Ekonomi/Politis/Kemanfaatan:
 - Diisi dengan analisis mengenai penguasaan tanah di lapangan.
 - Bila ada kemungkinan gejolak sosial atau ekses lain.
 - Kemanfaatan tindakan penyelesaian kasus bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
 - Resiko yang mungkin timbul akibat tindakan penyelesaian kasus.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Kesimpulan.
 - 1) Resume kronologis sengketa/konflik/perkara.
 - 2) Tanah sengketa berasal dari
 - 3) Singkat peralihan penguasaan.....
 - 4) Permasalahan timbul karena
 - 5) Kondisi akhir persengketaan....
- b. Pendapat hukum
 - 1) Dari aspek perdata pihak yang dinilai paling kuat memiliki alas hak atas tanah sengketa, adalah pihak yaitu berupa :
 - 2) Dari aspek TUN status dokumen kepemilikan yang lebih kuat/ #sah adalah dokumen dari pihak, dikuatkan dengan putusan....
- c. Rekomendasi
 - 1) Untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap No..... perlu dilakukan pembatalan terhadap SK.....
 - 2) Substansi Pembatalan adalah mencabut hak dan menghidupkan kembali ...
 - 3) Saran teknis untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi.
 - 4) Pelaksanaan pembatalan dilaksanakan oleh

Laporan ini telah kami kaji secara baik, mendalam, hati-hati, dan sesuai hukum pertanahan yang berlaku. Di samping itu, kami juga telah mempertimbangkan segala aspek pertanahan yang diperlukan untuk penetapan surat keputusan tersebut.

.....,

VII. LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN:

a. Tim Laporan Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara:

- 1) Nama jabatan: ()
2) Nama jabatan: ()
3) Nama jabatan: ()

b. Persetujuan Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian

Nama, jabatan: ()

c. Pendapat Direktur Sengketa dan Konflik/Direktur Perkara/Kepala Bidang

(Ditulis tangan)

(_____)
Nama
Jabatan

d. Pendapat Direktur Jenderal/Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pertanahan

(Ditulis tangan)

(_____)
Nama
Jabatan

e. Persetujuan/Arahan Pimpinan

(Ditulis tangan)

(_____)
Nama
Jabatan

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERKAS PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

BERKAS PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK/PERKARA*)

No. Reg: .../... /... /...

PERSENGKETAAN ATAS OBYEK TANAH
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
(Luas : Ha)

Terletak di :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

POKOK MASALAH:

ANTARA PARA PIHAK:

PIHAK PEMOHON :
PIHAK TERMOHON :
PIHAK LAINNYA :

No. & Tgl Pengaduan :

PENGOLAH KASUS:

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....
NAMA : NIP:..... JABATAN:.....
NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

PEJABAT PENGAWAS:

NAMA : NIP:..... JABATAN:.....

SATUAN KERJA PENGOLAH: Bidang/Seksi/Subseksi V

A. DAFTAR BERKAS

- I. Surat-surat
- II. Pengumpulan Data (data fisik, data yuridis dan data lainnya)
- III. Analisis
- IV. Pengkajian dan Pemeriksaan lapangan
- V. Paparan/Mediasi
- VI. Laporan penyelesaian sengketa/konflik/perkara
- VII. Surat-surat Lainnya

B. Lampiran:

- I. Dokumen dari Pihak Pemohon:
- II. Dokumen dari Pihak Termohon:
- III. Dokumen Pendukung lainnya:

C. PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA

DI KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN....*)

REG. NO...../...../...../

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Pengumpulan data			
2.	Analisis			
3.	Pengkajian			
4.	Pemeriksaan Lapangan			
5.	Paparan			
6.	Laporan penyelesaian sengketa/konflik/perkara			
7.	Mediasi			

Mengetahui :

Tanggal

Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian

Pengolah

(.....)

(.....)

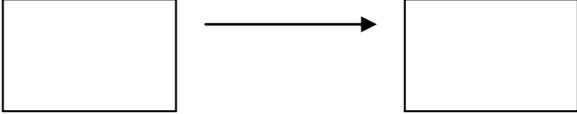
D. KEGIATAN PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)

REG. NO...../...../...../

NO	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN PENYELESAIAN	HASIL	PARAF PENGAWAS

E. GAMBAR SKETSA KASUS

REG. NO...../...../...../

GAMBAR SKETSA KASUS	KETERANGAN
	

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT KEPUTUSAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV..... *)
NOMOR :.....
TENTANG
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIFIKAT/PERUBAHAN
DATA PADA SERTIFIKAT, SURAT UKUR, BUKU TANAH DAN,
ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA *)

DALAM SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV

- MEMBACA : 1. Surat pengaduan/permohonan
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan.....
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
4. Laporan Penyelesaian Sengketa/Konflik/Perkara
5. dst.
- MENIMBANG : riwayat singkat permasalahan/kepemilikan tanah sampai menjadi obyek sengketa sesuai pembahasan Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik/Perkara, serta disimpulkan bahwa:
Pembatalan Hak Atas Tanah/Pembatalan Sertifikat/Perubahan Data Pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan, atau Daftar Umum Lainnya dst
- sesuai dengan hasil penyelesaian sengketa/konflik/perkara terdapat kesalahan administrasi dalam Pasal 11 ayat (3) yaitu.....; dan/atau
 - sesuai putusan pengadilan nomor yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu dilakukan tindakan administrasi pertanahan berupa pembatalan/pencabutan/penerbitan surat dst
- MENINGAT : Diuraikan dasar hukum dari surat keputusan pembatalan hak diterbitkan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau KEPALA KANTOR WILAYAH TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH/PEMBATALAN SERTIFIKAT/PERUBAHAN DATA PADA SERTIFIKAT, BUKU TANAH DAN, ATAU DAFTAR UMUM LAINNYA.

KESATU : Mencabut dan membatalkan surat keputusan/sertifikat/perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan, atau daftar umum lainnya ...

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan ... untuk :
 - Mencoret/memperbaiki sertifikat (jika ada), surat ukur, buku tanah, daftar umum dan daftar isian dalam sistem pendaftaran tanah; dan/atau;
 - Mengumumkan melalui ...

KETIGA : Mempersilahkan kepada pemohon pembatalan/yang berkepentingan untuk

KEEMPAT : Apabila ada kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada Tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAU KEPALA
KANTOR WILAYAH,

.....

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Pertanahan
2. Pemohon.
3. Pemegang hak yang dibatalkan/Pemegang Aset.
4. Pihak terkait

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
3. Kepala Ditjen (Pengolah Data);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota ...

*) pilih salah satu

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT MENTERI/KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV... *)
NOMOR :.....
TENTANG

PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PENGADUAN/PERMOHONAN

DALAM SENGKETA/KONFLIK/PERKARA*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- IV. KEPADA YTH. :
1. Kepala Kantor Pertanahan
 2. Pemohon.
 3. Pemegang hak yang dibatalkan/Pemegang Aset.
 4. Pihak terkait
- V. DASAR
- a. Surat permohonan
 - b. Surat Kepala Kantor Pertanahan.....
 - c. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...
 - d. Laporan Penyelesaian Sengketa
 - e. dst.
- VI. POKOK PERMASALAHAN ...
- VII. OBYEK YANG DISENGKETAKAN ...
- VIII. PARA PIHAK
- a. Pihak pengadu: nama, alamat sebagai pemilik SHM
 - b. Pihak lawan/terkait
- IX. HASIL PENANGANAN
- a. Kronologi singkat masalah.
Diisi resume kronologi sengketa dari awal sampai akhir perkara berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dituangkan di dalam RPD.
 - b. Proses penanganan.
Diisi dengan resume penyelesaian sengketa, yang telah dilaksanakan baik melalui jalur hukum oleh masing-masing pihak maupun penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN RI.

Berdasarkan hasil penyelesaian oleh Kementerian, bersama ini disampaikan bahwa pengaduan/permohonan Saudara terkait sengketa/konflik/perkara yang disampaikan kepada kami sesuai surat nomor, tanggal, tidak dapat kami laksanakan karena:

- a. Tidak termasuk cacat administrasi/bukan merupakan kewenangan kementerian sesuai Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor ... 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- b. Tidak dapat dilaksanakan putusan pengadilan nomor, karena pertimbangan Dst

..... ,,
Kepala Kantor Wilayah/Menteri.....,

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....;
3. Kepala Ditjen..... (Pengolah Data);
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten/Kota.....
5. Arsip.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT NOTULEN MEDIASI

KOP KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

NOTULEN MEDIASI
No. .../...../...

DALAM SENGKETA/KONFLIK*)
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

- I. DASAR
- Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian;
 - Berita Acara Pelaksanaan Mediasi
- II. POKOK MEDIASI
- Obyek sengketa/konflik:
Tanah terletak di....., seluas, dengan Sertipikat No...atas
nama Permohonan Pembatalan SK/SHM/SHGB No....
 - Para Pihak :
 - Pemohon : nama, alamat, sebagai pemegang SHM
 - Termohon : nama, status dalam perkara
 - Tempat dan Waktu Mediasi
 - Tempat :
 - Hari/tanggal/jam :
 - Pelaksana Mediasi
 - Pimpinan : Nama, jabatan, instansi
 - Mediator : Nama, jabatan, instansi
 - Peserta: (Daftar Peserta Terlampir)
- III. PELAKSANAAN MEDIASI
- Pembukaan mediasi oleh: ...
 - Pokok masalah ...
 - Tujuan mediasi ...
 - Dst
 - Mediasi oleh: ...
 - Kronologi masalah ...
 - Diskusi jalannya mediasi

.....

.....
- IV. HASIL MEDIASI
- Tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - Tidak tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - Rekomendasi.
 - Saran kepada instansi dan/atau kepada para pihak.

Kota, tanggal/bulan/tahun
Notulis (nama, jabatan)

Mengetahui
Pimpinan Mediasi/Mediator*)
(.....)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT BERITA ACARA MEDIASI

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MEDIASI
No. .../...../...

TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...
No.Reg.Kasus: ...

Pada hari ini ... tanggal: ... bulan ... tahun ... di ..., telah dilaksanakan mediasi sengketa/konflik/perkara dengan resume dan hasil sebagai berikut :

- I. DASAR
 - a. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik (apabila ada);
 - b. Surat Pengaduan/permohonan/inisiatif Kementerian
 - c. Surat Undangan Mediasi tanggal No.....
 - d. Surat lain yang perlu
 - e. Disposisi Pimpinan
- II. POKOK MEDIASI
 - a. Obyek Masalah Pertanahan;
 - b. Pelaksanaan Mediasi;
 - 1) Pimpinan Mediasi dan Mediator, (nama, jabatan, instansi)
 - 2) Peserta (nama, jabatan, instansi), (daftar peserta terlampir)
 - 3) Pokok permasalahan
 - a) Kronologi sengketa dan konflik;
 - b) Perkembangan penyelesaian sengketa dan konflik;
 - c) Pokok-pokok Diskusi/tanggapan.
- III. HASIL MEDIASI
 - a. Tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - b. Tidak tercapainya kesepakatan (uraikan)
 - c. Rekomendasi.
 - d. Saran kepada instansi dan/atau kepada para pihak.

Demikian Berita Acara Mediasi dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan dengan kesanggupan untuk dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku, ditutup dan ditandatangani di :

Kota, tgl/ bln/ tahun

Mengetahui:

Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian/Mediator *)

(.....)

Perwakilan Peserta Mediasi (*berisi Nama/instansi/jabatan*)

1. ... /... /... ()
2. ... /... /... () dst

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT PERJANJIAN PERDAMAIAN SENGKETA/KONFLIK*)

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

PERJANJIAN PERDAMAIAN SENGKETA/KONFLIK*)
Nomor: PPS/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal(dengan huruf) bulan..... (dengan huruf) tahun dua ribu....., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama, umur, pekerjaan, alamat, KTP Nomor-----
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

2. Nama, umur, pekerjaan, alamat, KTP Nomor-----
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal..... Nomor telah dicapai penyelesaian secara damai terhadap permasalahan tanah terletak di..... (letak obyek tanah masalah Jalan, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. DIRJEN
..... (nama, nip, ttd)
2. DIREKTUR
..... (nama, nip, ttd)
3. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROV
..... (nama, nip, ttd)
4. KEPALA BIDANG
..... (nama, nip, ttd)
5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
..... (nama, nip, ttd)
6. KEPALA SEKSI
..... (nama, nip, ttd)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN XXI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN ATAU MEDIASI TELAH SELESAI

DALAM SENGKETA/KONFLIK*
TANAH SELUAS ... M²/Ha, TERLETAK DI ...,
(*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*),
ANTARA ... DENGAN ...

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : pengaduan atau mediasi telah selesai

Kepada:

.....

1. Rujukan :
 - a. Surat Pengaduan saudara
 - b. Surat undangan mediasi
2. a. Obyek yang disengketakan:
Tanah seluas ... M²/Ha, terletak di ..., (*desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi*), antara ... dengan ... No.Reg.Kasus: ...
 - b. Para Pihak.
 - 1) Pihak pengadu: *nama, alamat sebagai pemilik SHM*
 - 2) Pihak termohon
3. Bersama ini diinformasikan perkembangan pengaduan atau mediasi telah selesai dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tindakan yang telah dilakukan...
 - b. kendala atau masalah lain...

Demikian untuk menjadi maklum.

Kota, tgl/ bln/ tahun
Kepala Kantor Pertanahan/Kepala Kantor
Wilayah BPN /Dirjen....

(.....)
NIP.

*)Pilih salah satu

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

FORMAT KEGIATAN PENANGANAN PERKARA

A. FORMAT KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

KARTU KENDALI PENANGANAN PERKARA
 DI PENGADILAN NEGERI/TUN.....
 PERKARA NOMOR :

MAJELIS HAKIM :

Ketua:

Anggota :

1.

2.

PANITERA PENGGANTI :

.....

KUASA HUKUM PENGGUGAT :

.....

KUASA HUKUM PENGGUGAT INT :

.....

KUASA HUKUM TERGUGAT/TURUT TERGUGAT:

.....

KUASA HUKUM TERGUGAT INT. :

.....

No.	Hari dan Tanggal	Agenda Sidang	Pelaksanaan
1.	Selasa, 2-12-11	Penyampaian gugatan	Ditunda karena hakim sakit
2	Dst		

*)Pilih salah satu

B. FORMAT SURAT KUASA KHUSUS

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini Menteri/Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Jabatan struktural
2. Nama : Jabatan struktural
3. Nama : Jabatan struktural
4. Nama : Staf

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan, Jalan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri,

K H U S U S

Untuk mewakili Menteri/Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan..... selaku Tergugat/Turut Tergugat dalam Perkara Nomor..... di Pengadilan Negeri, berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan tanggal..... Nomor..... tentang...../ Sertipikat, antara :

.....Selaku Penggugat.

MELAWAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....

.....Selaku-Tergugat/Turut Tergugat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadap ke Pengadilan Negeri....., dalam rangka menandatangani dan menyerahkan Jawaban, Duplik, bukti-bukti, mengajukan atau menolak bukti tertulis atau saksi-saksi, kesimpulan dan menghadap Instansi-Instansi, Pejabat-Pejabat lain yang berkepentingan, mengajukan atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengajukan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), dapat mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

.....,

Menteri/Kepala Kantor Wilayah BPN/
Kepala Kantor Pertanahan

.....
NIP.....

PENERIMA KUASA :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1.
NIP. | 2.
NIP. |
| 3.
NIP. | 4.
NIP..... |

*)Pilih salah satu

C. FORMAT NOTA DINAS/TELAAHAN STAF PENGANTAR SURAT KUASA KHUSUS

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

NOTA DINAS
NOMOR

Yth. : Menteri/Dirjen yang bertanggungjawab dalam menangani penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan/Kepala Kantor Wilayah BPN Prov /Kepala Kantor Pertanahan
Dari : Dirjen yang bertanggungjawab dalam menangani penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan/Kepala Bidang/Kepala Seksi yang menangani sengketa/konflik/perkara
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penanganan Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri ----
- tanggal --/--/----.

I. Dasar

- a. Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Sdr/PT. ---, tanggal --/--/----;
- b. Surat Panggilan Sidang Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri ----- tanggal --/--/----.

II. Para Pihak

Sdr/PT. ---- - Penggugat
Memilih alamat di ----

MELAWAN

PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - Tergugat
Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

III. Pokok-Pokok Gugatan

Dalam bagian ini, diuraikan secara singkat mengenai dasar diajukannya gugatan dan hal-hal yang dituntut/petitum oleh Penggugat.

IV. Pendapat Terhadap Gugatan

Dalam bagian ini diuraikan:

- pendapat/analisis terhadap dasar-dasar gugatan dan hal-hal yang dituntut dengan menggunakan alat analisis ketentuan-ketentuan hukum acara dan peraturan perundangan berkenaan dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan;
- rencana jawaban dan/atau langkah-langkah/strategi menghadapi gugatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, bersama ini kami siapkan konsep Surat Kuasa dalam rangka penanganan perkara dimaksud dan selanjutnya mohon pengesahan Bapak.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon keputusan lebih lanjut.

Dirjen/Kepala Bidang/Kepala Seksi

.....
NIP.....

*)Pilih salah satu

D. FORMAT REPLIK

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

....., --/--/----

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di –

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Jawaban yang diajukan oleh Sdr. --- tanggal --/--/----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa dari Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini Kuasa Hukum Penggugat menguraikan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat dengan tujuan agar Gugatan dapat diperiksa pokok perkaranya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam bagian ini Kuasa Hukum Penggugat menguraikan ketegasannya kembali dalil-dalil yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat. Di dalam Replik dimungkinkan terjadinya pengembangan dalil-dalil gugatan terhadap Tergugat mengikuti dinamika Jawab-jinawab dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak dengan tetap memperhatikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh karena hal-hal yang didalilkan pada saatnya harus didukung oleh alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat -- mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat --;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan tuntutan lain yang dimohon sesuai dengan kasusnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Replik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

----, --/--/----

Hormat Kuasa Penggugat --
Kuasanya

Catatan:

et a quo et bono, hanya disampaikan untuk perkara perdata tidak dalam TUN

*)Pilih salah satu

E. FORMAT DUPLIK

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

Jakarta, --/--/----

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di –

Dengan hormat,
Sehubungan dengan Replik yang diajukan oleh Sdr. --- tanggal --/--/----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.-- di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa dari Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Duplik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini Kuasa Hukum menguraikan ketegasannya mempertahankan bantahan terhadap Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut formalitas/syarat-syarat sahnya gugatan (eksepsi prosesuil dan materil). Kuasa Hukum dapat menambahkan/mengembangkan dalil-dalil bantahan tergantung pada dinamika Replik Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam bagian ini Kuasa Hukum menguraikan ketegasan sangkalan/bantahan terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan hal-hal yang digugat. Hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi agar dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara. Di dalam Replik dimungkinkan terjadinya pengembangan dalil-dalil bantahan terhadap Penggugat mengikuti dinamika Jawab-jinawab dalil-dalil yang disampaikan Para Pihak dengan tetap memperhatikan alat-alat bukti yang dimiliki oleh karena hal-hal yang didalilkan pada saatnya harus didukung oleh alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat -- mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat --;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Duplik ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat -- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Kota, --/--/----

Hormat Kuasa Tergugat –

Kuasanya

Catatan:

et a quo et bono, hanya disampaikan untuk perkara perdata tidak dalam TUN

*)Pilih salah satu

F. FORMAT JAWABAN GUGATAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

JAWABAN TERGUGAT -----
Dalam Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri ----
Antara Para Pihak :

PT. --- : PENGGUGAT
MELAWAN

1. Sdr. --- - Tergugat I
2. PT. --- - Tergugat II
3. Notaris --- - Tergugat III
4. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi----- Cq Kepala Kantor Pertanahan -----. - Tergugat IV
5. Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi -----. - Tergugat V
6. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. - Tergugat VI

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri ---
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,
Sehubungan dengan gugatan yang diajukan PT. ----- yang beralamat di -----, yang terdaftar dalam register perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.11 di Pengadilan Negeri -----, dengan ini kami selaku Kuasa Tergugat -- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. --/Sk/-/2011 mengajukan Jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Dalam bagian ini kuasa hukum harus menguraikan dasar dan alasan bantahan yang menyangkut belum dipenuhinya formalitas gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima, misalnya gugatan kurang pihak, gugatan lewat waktu, pengadilan tidak berwenang secara relatif dan absolut, surat kuasa tidak memenuhi syarat, dll yang termasuk eksepsi *prosesuil* dan eksepsi materiil (yang didasarkan ketentuan hukum materiil seperti *dilatoire eksepsi* untuk menunda gugatan karena gugatan prematur);

II. DALAM POKOK PERKARA (*verweer ten principale*/kompensi) :

Dalam bagian ini agar kuasa hukum menguraikan secara jelas, singkat, padat langsung pada pokok persoalan berisi:

1. penyangkalan terhadap gugatan; membantah *fundamentum petendi* dan/atau ;
2. mengemukakan fakta baru.

III. PETITUM

Dalam bagian ini kuasa hukum menyampaikan hal-hal yang dimohon/diminta kepada Majelis Hakim untuk diputus, sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Petitum dapat ditambahkan sesuai dengan situasi dan kondisi gugatan/pihak-pihaknya, misalnya sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No. --/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di -----, Provinsi ---- adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Negeri ---- No. --/Pdt.G/----/PN.-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Pengadilan Tinggi ---- No. --/Pdt/---/PT.-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. -- K/PDT/-- tertanggal --/--/---- jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. -- PK/PDT/-- tertanggal --/--/----.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat --- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

-----, --/--/----
Hormat Kuasa Tergugat ----
Kuasanya,
1. ----
2. ----
3. ----

Catatan:

Format jawaban ini berlaku juga untuk beracara di Pengadilan TUN.

*)Pilih salah satu

G. FORMAT GUGATAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

GUGATAN PENGGUGAT ---

Dalam Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri ----
Antara Para Pihak :

Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI : PENGGUGAT
MELAWAN

Sdr. --- - Tergugat

Kepada,
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri ---
Up. Majelis Hakim Perkara No. --/PDT.G/2011/PN.--
di -

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami selaku kuasa dari ---- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal --/--/---- No. ---- mengajukan Gugatan kepada ---- sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA (*fundamentum petendi/posita*) :

Dalam bagian ini agar kuasa hukum menguraikan secara jelas, singkat, padat langsung pada dalil konkrit disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van de eis*) yang terdiri dari:

1. uraian tentang kejadian/peristiwa (*feitlijk gronden*):
 - menguraikan obyek perkara, mengapa sampai diajukan ke pengadilan, mengapa sampai dituntut kepemilikannya. Dalam hal ini, Penggugat harus mampu menunjukkan legal standing Penggugat maupun Tergugat sehingga memenuhi syarat untuk digugat;
 - dalam hal berkenaan dengan tanah harus jelas cara perolehannya, letak dan batas luasnya, hubungan antara obyek dengan Penggugat, jika sudah bersertipikat disebutkan nomor, jenis, dll. Hal ini penting karena ketidakjelasan obyek dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
2. uraian hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan (*rechts gronden*)
 - menguraikan asal-muasal perbuatan melawan hukum/undang-undang (*onrechtmategdaad*) dan hukum yang mana harus melindungi kepentingan Penggugat.

II. PETITUM

Dalam bagian ini kuasa hukum Penggugat menyampaikan apa yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Penggugat yang akan diputus Majelis Hakim dalam amar. Tuntutan dapat berupa tuntutan pokok dan tambahan, tuntutan agar diputus seadil-adilnya (*et aequo et bono*), tuntutan mengenai pembebanan ongkos perkara, dwangsom, dan sebagainya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat --- memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Kota, --/--/----
Hormat Kuasa Penggugat ----
Kuasanya,
1. ...
2. ...
3.

Catatan:

- Format gugatan ini berlaku juga untuk beracara di Pengadilan TUN;
- Surat gugatan dibubuhi Materai cukup;
- Ditanda tangani Penggugat atau kuasanya yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus/Subtitusi.
- *et a quo et bono* hanya disampaikan untuk perkara TUN.

*)Pilih salah satu

H. FORMAT AKTA BUKTI

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

DAFTAR BUKTI TERGUGAT --
Dalam Perkara
No.--/Pdt.G/2011/PN.--
Di Pengadilan Negeri -----

Antara :

Sdr.....PENGGUGAT

MELAWAN

Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
.....TERGUGAT

Jakarta, --/--/----

Kepada Yth. :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri -----
U.p. Majelis Hakim Perkara No. --/Pdt.G/2011/PN.--

Di-

Bersama ini perkenankanlah kami ---- dan ----- selaku kuasa dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic. Tergugat -- dalam perkara Nomor: --/Pdt.G/2011/PN.-- berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ----- tanggal --/--/----, menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Pada bagian ini uraikan Dokumen/Alat Bukti dari Tergugat. Alat bukti yang disampaikan harus relevan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Untuk itu, pada setiap uraian tentang alat bukti perlu dibuat penjelasan mengenai peristiwa hukum yang ingin dibuktikan yang mendukung dalil Tergugat. Contoh sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal --/--/---- Nomor - ----- tentang -----. Bukti T.I -1 menunjukkan bahwa pemberian hak dilakukan setelah dilakukan pembebasan sesuai ijin lokasi. Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan hukum SK dimaksud.
2. Bukti T-2 : SK Bupati tentang Penetapan Izin Lokasi ---- tanggal --/--/---- No. - -----. Bukti T.I - 2 membuktikan bahwa penerima hak telah melakukan perolehan tanah sesuai dengan prosedur dan berada pada lokasi yang ditetapkan.
3. Bukti T-3 : Surat-surat Pelepasan Hak tanggal --/--/---- No. -----. Bukti T-3 membuktikan bahwa kepemilikan penerima hak adalah sah karena diperoleh melalui pemberian ganti rugi dan/atau pelepasan hak dari penggarap/pemilik tanah.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Tergugat

*)Pilih salah satu

I. FORMAT SURAT KUASA SUBSTITUSI

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN*)

SURAT KUASA SUBSTITUSI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :

Selaku Kuasa dari Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan....., sesuai dengan Surat Kuasa tanggal.....Nomor ... selaku Tergugat/Turut Tergugat, dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

Nama :
Jabatan, :
NIP :

Dalam hal ini memilih alamat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan....., Jalan Dalam Perkara Nomor, antara :

.....Selaku Penggugat.
MELAWAN
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
Kepala Kantor Pertanahan.....Selaku - Tergugat/Turut Tergugat.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Penerima Kuasa Substitusi untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berhak menghadap ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara....., dalam rangka menandatangani dan menyerahkan Jawaban, Duplik, bukti-bukti, mengajukan atau menolak bukti tertulis atau saksi-saksi, kesimpulan dan menghadap Instansi-Instansi, Pejabat-Pejabat lain yang berkepentingan, mengajukan atau menolak keterangan saksi-saksi, dapat mengajukan perdamaian dengan segala syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, meminta dihentikan atau dilaksanakan putusan (eksekusi), dapat mengambil segala tindakan yang perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian kuasa ini.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi.

.....
Pemberi Kuasa Substitusi,

Penerima Kuasa Substitusi,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*)Pilih salah satu

J. REKAPITULASI KEGIATAN DI PERSIDANGAN

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN/KANTOR WILAYAH BPN/KEMENTERIAN

REKAPITULASI KEGIATAN DI PERSIDANGAN
Kementerian/Kantor Wilayah BPNProv .../Kantor Pertanahan ...
BULAN TAHUN

KEGIATAN	Bulan												JUMLAH
	Ja	Fb	Mr	Ap	Me	Ju	Jl	Ag	Sp	Ok	Np	Ds	
Sidang Perdata													
Sidang PTUN													
Sidang Pidana													
Jumlah kegiatan													
Pertama													
Banding													
Kasasi													
PK													
BPN Menang													
BPN Kalah													
Saksi Ahli													
Saksi Sidik													

Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan/satu kesatuan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

TTD

FERRY MURSYIDAN BALDAN